



**PERSPEKTIF MODAL SOSIAL UNTUK KEBIJAKAN
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DAERAH (STUDI PADA PEDAGANG DI KAWASAN PANTAI
KAMALI KOTA BAUBAU-SULAWESI TENGGARA)**

Andy Arya Maulana Wijaya
Universitas Muhammadiyah Buton
bulawambona.87@gmail.com

***Abstract:** Some of the problems that are often the problem of regional SMEs group are capital access, minimal skills and technology, weak marketing access, environment and less conducive competition. Not to mention the weaknesses are often the only aspect that made local governments in making policies related to the empowerment of UMKM. The review in this paper seeks to provide other perspectives on regional empowerment policies of regional MSMEs. Where, through the perspective of social capital, MSME groups are able to empower their groups. This paper takes a study on a group of MSME traders in the Kamali Township of Baubau Town. The research used qualitative descriptive method, conducted through case study approach. Data obtained through interview and direct observation, while the data obtained through purposive sampling combined with snowball sampling and then analyzed interactively. This paper provides an indication that the merchant group has a set of social capital values such as trust, norms and cooperation and informal leadership that are quite effective in organizing groups informally. Capacity is then able to as a means to solve problems and at the same time as a mechanism of empowerment that comes from a group of UMKM traders themselves. Therefore, the local government of Baubau City can make the capacity for formulation of community empowerment policy especially MSME sector.*

***Keywords:** Social capital, Empowerment Policy, UMKM*

Abstrak: Beberapa persoalan yang seringkali menjadi masalah kelompok UMKM daerah yaitu akses modal, minim keterampilan dan teknologi, akses pemasaran yang lemah, lingkungan serta persaingan yang kurang kondusif. Belum lagi kelemahan tersebut seringkali menjadi satu-satunya aspek yang dijadikan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan terkait pemberdayaan UMKM. Kajian dalam makalah ini mengupayakan memberikan perspektif lain dalam kebijakan pemberdayaan UMKM daerah. Dimana, melalui perspektif modal sosial kelompok UMKM mampu memberdayakan kelompoknya. Makalah ini mengambil studi pada kelompok pedagang UMKM di Kawasan pantai Kamali Kota Baubau. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dilakukan melalui pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data diperoleh melalui *purposive sampling* dipadukan dengan *snowball sampling* kemudian dianalisis secara interaktif. Makalah ini memberikan indikasi bahwa kelompok pedagang memiliki serangkaian nilai modal sosial seperti kepercayaan, norma dan kerjasama serta kepemimpinan informal yang cukup efektif dalam mengorganisasikan kelompok secara informal. Kapasitas ini kemudian mampu sebagai sarana memecahkan masalah dan sekaligus sebagai mekanisme pemberdayaan yang berasal dari kelompok pedagang UMKM sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Baubau dapat menjadikan kapasitas tersebut untuk formulasi kebijakan pemberdayaan masyarakat khususnya sektor UMKM.

***Kata Kunci:** Modal sosial, Kebijakan Pemberdayaan, UMKM*

Pendahuluan

Dasar penelitian ini menganggap bahwa modal sosial (*social capital*) bukan saja berbicara tentang organisasi atau komunitas lokal, namun modal sosial adalah kapasitas masyarakat dalam menggunakan sumberdayanya untuk berkembang secara maksimal. Penelitian ini kemudian memusatkan perhatian pada Sektor UMKM terutama pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Pantai Kamali Kota.

Dibeberapa tempat keberadaan UMKM utamanya PKL masih dianggap pengganggu ketertiban publik, namun anggapan itu bukan berarti bahwa setiap hal menyangkut PKL sepenuhnya seperti itu. Didalam komunitas masyarakat tidak terlepas juga komunitas PKL tentu memiliki serangkaian nilai yang menjadikan komunitas masyarakat memiliki kapasitas untuk berkembang.

Namun persoalan yang seringkali menjadi masalah kelompok UMKM daerah yaitu akses modal, minim keterampilan dan teknologi, akses pemasaran yang lemah, lingkungan serta persaingan yang kurang kondusif. Belum lagi kelemahan tersebut seringkali menjadi satu-satunya aspek yang dijadikan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan terkait pemberdayaan UMKM. Seperti penelitian mengenai modal sosial oleh komunitas masyarakat, menyebutkan bahwa melalui modal sosial masyarakat mampu menyediakan layanan publik yang belum mampu disediakan oleh pemerintah. Melalui pemanfaatan modal sosial seperti kepercayaan, jaringan dan kerjasama masyarakat menjadi basis pengembangan komunitas masyarakat (Bowles dan Gintis, 2002; Sudarmo, 2006; Suharto, 2008; Wijaya, 2014).

Salah satu manfaat fisik yang ditunjukkan oleh Pedagang di kawasan Pantai Kamali tidak saja ikut meramaikan ruang publik yang memungkinkan adanya pertambahan nilai pendapatan bagi pengelolaan aset-aset ruang publik Kota Baubau. Misalnya saja melalui retribusi pedagang, retribusi kebersihan, pemasukan dari jasa parkir, sebagai promosi kawasan wisata malam, hingga mampu menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kota Baubau.

Komunitas pedagang di Kawasan Pantai Kamali Kota Baubau secara tidak langsung berpartisipasi dalam penyediaan kebutuhan masyarakat luas. Ini berarti bahwa pedagang telah ikut berpartisipasi menyediakan lapangan pekerjaan yang tidak mampu disediakan oleh pemerintah.

Karena itu, penelitian ini mencoba menjelaskan kapasitas tersebut sebagai bentuk modal sosial kelompok Pedagang kawasan Pantai Kamali untuk kemudian dapat dijadikan pertimbangan bagi kebijakan pemberdayaan sektor ini. Olehnya itu modal sosial dianggap sebagai nilai lokal dalam kebijakan publik atau kebijakan pemberdayaan serta penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis ditingkat lokal.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dilakukan melalui pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data diperoleh melalui *purposive sampling* dipadukan

dengan *snowball sampling* kemudian dianalisis secara interaktif. Sehingga mudah mendapati simpulan dari apa yang diteliti secara menyeluruh.

Peran Modal Sosial Untuk Kebijakan Pemberdayaan

Sebagaimana modal dalam kegiatan ekonomi, modal sosial juga memiliki nilai dalam pemberdayaan masyarakat. Jika kemudian hal tersebut dituangkan dalam kebijakan publik, bukan tidak mungkin modal sosial memiliki kemampuan untuk dapat ikut berkontribusi bagi pembangunan suatu daerah. Edi Suharto (2011) menjelaskan bahwa modal sosial dewasa ini juga diakui sebagai faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara.

Modal sosial itu sifatnya produktif, dalam artian bahwa interaksi modal sosial memiliki capaian-capaian positif bagi perkembangan komunitas masyarakat jika kemudian dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Meskipun interaksi terjadi karena berbagai alasan, orang-orang berinteraksi, berkomunikasi dan kemudian menjalin kerjasama pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan untuk berbagi cara mencapai tujuan bersama yang tidak jarang berbeda dengan tujuan dirinya sendiri secara pribadi. Keadaan ini terutama terjadi pada interaksi yang berlangsung relatif lama (Suharto, 2007: 98).

Tentunya modal sosial akan semakin kuat jika ia senantiasa digunakan di masyarakat. Seperti misalnya melalui ikatan-ikatan modal sosial kemudian menjadi sarana masyarakat berkerjasama dengan berbagai pihak atau dengan pemerintah. Dengan begitu, komunitas lokal mampu mengarahkan perubahan dengan inovasi, dan penyelenggaraan pemerintahan akan lebih efektif ketika pemerintah dan komunitas masyarakat bekerjasama (Eversole, 2011: 66). Dalam pendekatan lain, kebijakan publik memiliki karakteristik yang disesuaikan dengan daerah dimana kebijakan itu diimplementasikan (Nugroho, 2014), karenanya modal sosial dapat diperhatikan sebagai bagian komponen karakteristik itu.

Kajian modal sosial kemudian tidak saja menjadi domain dalam studi-studi kemasyarakatan saja namun juga sebagai bagian dari konsep ilmu administrasi publik dan pemerintahan. Hal ini sebagai imbas oleh dikembangkannya konsep *governance* yang kemudian melihat apa yang dapat dilakukan komunitas masyarakat dalam membantu jalannya penyelenggaraan pemerintahan dengan efektif. Sebagai bentuk pertautan tersebut, kemudian modal sosial dapat dipahami dalam beberapa hal, yakni partisipasi dalam suatu jaringan (*networks*), hubungan timbal balik (*reciprocity*), kepercayaan (*trust*), norma sosial (*norms*), nilai-nilai (*values*) dan tindakan yang pro aktif (*pro active act*) (Hasbullah, 2006: 9; Sudarmo, 2011: 197-198; Suharto, 2011: 98-100).

Bersandar pada norma-norma dan nilai-nilai bersama, asosiasi antar manusia tersebut menghasilkan kepercayaan yang pada gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur (Fukuyama, 1995). Bahkan perkembangannya saat ini modal sosial di suatu komunitas dapat turut mempengaruhi kebijakan

publik (Suharto, 2011; Fields, 2008). Karena itu, sebagai kepentingan penelitian ini maka modal sosial dapat dijelaskan pada serangkaian unsur yang dimilikinya.

Terkait hal ini, Suharto (2011) menjelaskan kriteria menakar modal sosial dalam komunitas, yaitu ; (a) Kepercayaan, bahwa hal ini bisa menumbuhkan dan mempermudah pertukaran dan interaksi antar individu-individu, kelompok-kelompok dan isntitusi-institusi. (c) norma, terdiri dari pemahaman, nilai, harapan dan tujuan yang ingin dicapai bersama kelompok/ komunitasnya. (b) Kerjasama, hal ini mengakui bahwa komunitas masyarakat seringkali tidak bisa menyediakan kepentingannya sendiri maka dengan melakukan kerjasama atau aktivitas kolektif untuk menanggulangnya.

Tentang Pedagang UMKM Kawasan Pantai Kamali

Kawasan pantai kamali terletak di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio Kota Baubau. kawasan ini adalah kawasan ter”sibuk” di Kota Baubau, khususnya Kawasan Pantai Kamali yang merupakan jantung aktivitas ekonomi dan rekreasi masyarakat pada malam hari. Pedagang di kawasan ini terbagi dalam beberapa kelompok, misalnya kelompok pedagang makanan, pedagang gorengan, pedagang aksesoris serta pedagang kaset. Dimana para pedagang ini memiliki koordinator atau ketua untuk masing-masing kelompok.

Kawasan Pantai Kamali adalah salah satu ruang publik yang ramai dimanfaatkan masyarakat, pemanfaatan kawasan pantai kamali selain sebagai tempat rekreasi, ruang publik dan sarana bermain juga dimanfaatkan oleh komunitas pedagang kaki lima (PKL). Hingga kini, komunitas PKL di kawasan ini terus berkembang dan makin beragam variasi dagangan yang disediakan.

Seiring dengan perkembangan tersebut, tentu keberadaan PKL di kawasan Pantai Kamali tidak saja ikut meramaikan ruang publik dengan berbagai macam dagangan yang disediakan, namun kondisi ini juga memungkinkan adanya pertambahan nilai pendapatan bagi pengelolaan aset-aset ruang publik Kota Baubau. Misalnya saja melalui retribusi pedagang, retribusi kebersihan, pemasukan dari jasa parkir, sebagai promosi kawasan wisata malam, hingga mampu menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kota Baubau.

Tabel 1 :
Jenis dan Jumlah Pedagang di Kawasan Pantai Kamali

| No. | Jenis Pedagang | Jumlah |
|-----|----------------------------|--------|
| 1. | Pedagang Makanan/Gorengan | 53 |
| 2. | Pedagang Aksesoris | 23 |
| 3. | Penyedia Jasa Bermain Anak | 10 |
| 4. | Pedagang Kaset | 8 |
| | Total : | 94 |

Sumber: Data Lapangan (Januari 2015)

Dengan semakin menjamurnya pedagang kaki lima di berbagai daerah, termasuk di Kawasan Pantai Kamali Kota Baubau, maka secara tidak langsung sebenarnya komunitas PKL ikut berpartisipasi dalam penyediaan kebutuhan masyarakat luas. Ini berarti bahwa sektor PKL telah ikut berpartisipasi menyediakan lapangan pekerjaan yang tidak mampu disediakan oleh pemerintah. Demikian pula, keberadaan mereka telah memberikan kontribusi finansial bagi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pungutan retribusi dan kampanye ekowisata yang sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Baubau.

Salah satu kontribusi aktivitas pedagang kaki lima di kawasan pantai kamali, sesuai dengan Perda No. 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimana untuk aktivitas pedagang kaki lima kawasan Pantai Kamali saja mampu memberikan pemasukan pada 3 objek retribusi. 1) Retribusi Perdagangan Rp 7.936.000 /bulan; 2) Retribusi Kebersihan Rp 7.623.000 /bulan; dan 3) Retribusi Parkir Rp 420.000 /bulan (Dispenda, tahun 2012; dalam Bitta, 2012). Ditambah lagi pada sisi pendapatan masyarakat dari aktivitas perdagangan di kawasan pantai kamali yang terus meningkat, karena kawasan ini bisa dibilang sebagai jantung aktivitas malam masyarakat Kota Baubau. Kondisi ini tentu dapat memberikan rangsangan kepada masyarakat lainnya untuk mencari rejeki dengan jalan berdagang di kawasan pantai kamali.

Betapapun demikian, pedagang UMKM kawasan pantai kamali pada beberapa aspek dianggap mengganggu ketertiban misalnya saja hampir seluruh kawasan pantai kamali dipenuhi oleh pedagang. Tentu hal ini tidak sejalan dengan peruntukan kawasan pantai kamali tersebut. Selain itu, keramaian serta persaingan usaha oleh karena dagangan yang relatif sama seringkali memicu konflik (perkelahian, cekcok, dsb). Namun para pedagang melalui ketua-ketua kelompoknya dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan melakukan serangkaian upaya untuk menanggulangi hal tersebut.

Salah satu upaya tersebut adalah pembuatan marka jalan dari besi oleh para pedagagang, yang ditujukan untuk penataan kawasan jalan. Sedangkan untuk mencegah konflik, selain melalui pembentukan aturan-aturan bersama pedagang juga membuat gardu pos untuk polisi secara sukarela. Oleh karena itu, kelemahan-kelemahan tersebut membutuhkan campur tangan pemerintah sebagai *complement* dalam bentuk kebijakan pemberdayaan untuk pada pedagang sehingga nilai modal sosial tersebut dapat terus dioptimalkan.

Modal Sosial Pedagang UMKM Kawasan Pantai Kamali

Pentingnya modal sosial dalam pemberdayaan sektor UMKM dapat disebutkan karena modal sosial dapat memberikan manfaat pada masyarakat itu sendiri. Dasar dari terbentuknya modal sosial adalah rasa percaya (*trust*) yang menjadi pengikat masyarakat. Modal sosial juga dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan publik utamanya dalam pemberdayaan masyarakat, dengan

memanfaatkan kepemilikan modal sosial maka implementasi kebijakan publik akan lebih mudah direspon oleh masyarakat, oleh karena nilai-nilai dan harapan yang disematkan dalam kebijakan publik tidak bertentangan dengan nilai di masyarakat.

Potensi modal sosial untuk kebijakan publik pada komunitas pedagang UMKM kawasan pantai kamali yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Didalam kelompok pedagang UMKM Kawasan pantai kamali terbagi dalam beberapa kelompok kecil berdasarkan pada jenis dagangan mereka. Namun tetap ada pemimpin yang menjadi koordinator para pedagang secara keseluruhan. Melalui pemimpin kelompok, pedagang mempercayakan berbagai urusan mengenai perizinan usaha, retribusi hingga jika ada persoalan-persoalan usaha mereka. contohnya saja, jika ada pedagang baru yang akan masuk maka ketua kelompok memfasilitasi serta membantu dalam perizinan di tingkat kelurahan, atau jika tidak ada tempat jualan lagi maka bisa dibatalkan oleh ketua kelompok.

Disisi lain, saling percaya diantara pedagang kawasan pantai kamali adalah mengenai keyakinan tentang pembagian rejeki. Seperti yang terlihat di lapangan bahwa hampir sebagian besar barang dagangan mereka sama saja, namun sangat jarang terjadi adanya konflik oleh karena persaingan dagangan mengingat *customer* yang terbatas. Para pedagang percaya bahwa rejeki sudah ada yang atur, yang penting mereka dikawasan pantai kamali cara rejeki masing-masing, saling bantu jika ada yang kesulitan, bahkan ikatan ini dilembagakan dalam bentuk arisan.

2. Norma

Dalam menjalankan aktivitas perdagangan di kawasan pantai kamali, para pedagang membentuk aturan-aturan kolektif yang dihasilkan dalam musyawarah pedagang. Tentu dalam penetapannya di fasilitasi oleh pihak kelurahan. Dengan adanya norma atau aturan kolektif pedagang memiliki kemampuan organisasional dalam mengatur aktivitas mereka. Hal ini tercermin dalam mekanisme pemungutan retribusi, jarak petak jualan, ketinggian rak jualan, model dan bahan tenda jualan, dan pembagian listrik serta pengaturan bagi pedagang baru. Aturan mengenai ini dilakukan untuk menghindari adanya kecemburuan sosial antara satu sama lain.

Melalui norma atau aturan yang sepenuhnya dipercayakan kepada ketua kelompok untuk memberikan sanksi yang melanggarnya, norma ini juga yang kemudian mampu membangun ikatan kekeluargaan diantara para pedagang di kawasan pantai kamali. Mengingat bahwa secara basis

ikatan kultural, pedagang disini berasal dari berbagai daerah dan etnis berbeda-beda, misalnya saja ada orang bugis-makassar, orang pulau (penyebutan untuk orang yang berasal dari wilayah buton kepulauan), dan orang pribumi (orang Baubau) sendiri. Pada intinya nilai ini mampu menjadi nilai pengikat solidaritas pedagang, sehingga mekanisme pemberdayaan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan hal ini. Norma atau nilai kolektif seperti ini mengindikasikan adanya tujuan, harapan dan cita-cita bersama oleh para pedagang tersebut.

3. Kerjasama

Dalam setiap aktivitas perdagangan tentu diperlukan adanya kerjasama antar pedagang, melalui organisasi pedagang dalam bentuk kelompok-kelompok pedagang menjadi sarana untuk memperkuat itu. Pedagang memahami bahwa dalam melakukan aktivitas perdagangan harusnya didasari oleh saling pengertian dan toleransi, antar sesama pedagang. karena dalam membangun sebuah kelompok dagang untuk memperkuat hubungan antar sesama pedagang harus di bangun kedua hal tersebut.

Posisi ini para pedagang memiliki kesadaran untuk kemudian saling kerjasama dalam melaksanakan kegiatan aktivitas dagangan mereka. Dibeberapa kondisi, bentuk kerjasama ini dilakukan dalam bentuk sumbangan bersama untuk kegiatan-kegiatan karang taruna kelurahan wale, sumbangan bagi anggota kelompok yang terkena musibah, hingga kerjasama dalam penyediaan barang dagangan mereka. disamping itu, kerjasama juga dilakukan dalam hal menjaga kebersihan dan keamanan kawasan pantai kamali.

Dalam aspek lain, kerjasama pedagang tersebut menyangkut pengaturan aset-aset kolektif misalnya pembagian listrik dan tempat jualan. Sehingga untuk memutuskan hal itu dilakukan dalam musyawarah kelompok, untuk kemudian menghindari adanya saling tidak enak antara pedagang. Kerjasama seperti ini tentu mengindikasikan didalam kelompok pedagang terdapat keinginan bersama untuk mengatur diri mereka, serta kemampuan organisasional pedagang. disamping itu, kerjasama memberikan penjelasan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa di sediakan secara individual namun dapat dipecahkan/ diselesaikan secara kolektif atau kerjasama dengan pihak pemerintah daerah.

Tabel 2.
Komponen Modal Sosial Kelompok Pedagang

| No. | Komponen Modal Sosial | Kapasitas Kelompok Pedagang Kawasan Pantai Kamali |
|-----|------------------------|--|
| 1. | Kepercayaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Kepercayaan terhadap pemimpin kelompok dalam menyelesaikan berbagai urusan mengenai perizinan usaha, retribusi hingga jika ada persoalan-persoalan usaha mereka, b. Terdapat kepercayaan bahwa rejeki sudah ada yang mengatur, sehingga menghindari adanya cekcok oleh customer yang kurang. |
| 2. | Norma (Aturan bersama) | <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat aturan kolektif dalam pemungutan retribusi, pembagian lapak jualan, ketinggian rak jualan, model dan bahan tenda jualan, listrik, serta aturan bagi pedagang baru. b. Terdapat sanksi bagi anggota kelompok yang melanggar. |
| 3. | Kerjasama | <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya saling pengertian dan toleransi antara pedagang. b. Empati bagi anggota kelompok yang terkena musibah. c. Adanya kerjasama dalam menjaga kebersihan dan keamanan. |

Sumber: diolah dari data Primer

Kapasitas modal sosial perdagangan kawasan pantai kamali selain merupakan nilai kolektif namun juga memiliki nilai produktif. Dalam artian bahwa sistem kepercayaan, norma dan kerjasama yang menjadi basis modal sosial pedagang, memiliki andil dalam pengaturan kolektif aktivitas ekonomi yang mereka jalankan. Betapapun demikian, kapasitas ini kemudian diperhadapkan oleh sebuah kondisi yang *unpredictabel*, sehingga kapasitas ini juga memerlukan pendampingan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Baubau dalam bentuk kebijakan pemberdayaan.

Mencermati kondisi kapasitas kelompok pedagang tersebut diatas, dapat memberikan gambaran bahwa dalam kelompok perdagangan kawasan pantai kamali seyogyanya memiliki kapasitas intern untuk kemudian berkembang. Hanya saja, ada persoalan-persoalan kolektif yang belum mampu dipenuhi hanya dengan memanfaatkan modal sosialnya. Karena itu, melalui kebijakan pemberdayaan yang tepat mampu memperkuat modal sosial (Suharto, 2006). Karena itu, penting kiranya secara teknis kebijakan publik dalam hal ini kebijakan sosial dapat menjadikan nilai modal sosial suatu kelompok masyarakat sebagai basis pemberdayaan masyarakat.

Kesimpulan

Kapasitas modal sosial kelompok pedagang UMKM di kawasan pantai kamali menunjukkan kapasitas yang cukup memadai dalam pengembangan diri para pedagang. hal ini ditunjukkan dari komponen modal sosial yang berlangsung di kelompok pedagang, yakni kepercayaan antar pedagang dan antar ketua kelompoknya, terdapat norma (aturan kolektif) yang disepakati bersama dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya, serta adanya kerjasama antar pedagang dalam melaksanakan aktivitas ekonomi mereka dikawasan pantai kamali.

Namun, seiring perkembangan kedepan tentunya kelompok pedagang diperhadapkan pada persoalan yang *unpredictabel*. Sehingga kapasitas modal sosial tersebut tetap membutuhkan dukungan pemerintah daerah kota baubau, dan melalui kebijakan pemberdayaan yang tepat mampu ikut memperkuat modal sosial kelompok pedagang pantai kamali untuk keberdayaan pedaganga dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- Bittu, Sitti Samniar. 2012., Mekanisme Pemungutan Retribusi Di Pantai Kamali Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau, *Skripsi* ; Program Studi Administrasi Negara, FISIP UNIDAYAN BAUBAU.
- Bowles, Samuel and Herbert Gintis, Social Capital and Community Governance. 2002. *The Economic Journal* 112 (November), F419-F436. Royal Economic Society. Diakses melalui <http://tuvalu.santafe.edu/~bowles/SocialCapital.pdf>. (10/10/2013. pukul 22.00 wib)
- Eversole, Robyn. 2011., *Community Agency and Community Engagement: Re-theorising Participation in Governance*, Journal of Public Policy / Volume 31 pp 51-71, http://journals.cambridge.org/abstract_S0143814X10000206 (10/10/2013. pukul 22.00 wib)
- Field, John. 2010., *Modal Sosial*, Bandung: Kreasi Wacana.
- Fukuyama, Francis.,2010. *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Nugroho, Riant. 2014., *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. 2014., *Metode Penelitian Kebijakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi, 2011., *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Sudarmo, 2011. *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*, Surakarta: Smart Media.

- Sudarmo. 2008. Social Capital untuk Community Governace, *Jurnal Spirit Publik*, Volume 4, Nomor 2 Halaman 101-112.
- Utami, Sri. 2007., Tantangan Seputar Usaha Kecil dan Beberapa Pemikiran Untuk Pembinaan, *Jurnal Ilmu Sosial Alternatif Volume VIII, No.2 bulan Desember 2007*